

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu primadona bagi negara-negara dalam upaya meningkatkan pendapatan diluar dari migas. Industri pariwisata tidak hanya terkait dengan bisnis perjalanan umum, tetapi juga pada tingkat kunjungan wisatawan, pada kawasan yang dilindungi seperti taman nasional, cagar alam, dan yang lainnya (Iswandi, 2016). Industri pariwisata menjadi sarana untuk menjaga dan memperbaiki lingkungan yang sudah ada. Pariwisata menjadi pendorong dalam pembangunan ekonomi regional. Pariwisata diharapkan mampu memberikan sumbangsih dalam rasa toleransi, menghormati, serta penigkatan pendapatan daerah (Priyadi, 2016).

Pariwisata idealnya akan memiliki dampak pada partisipasi dan peran masyarakat setempat secara aktif, sebab masyarakat yang memiliki kebudayaan dengan norma dan adat istiadat yang berlaku dimasyarakat. Kehidupan masyarakat desa yang masih bergantung dengan alam yang ada diwilayah atau desanya, serta kehidupan ekonomi yang masih sederhana perlu ditingkatkan (Wahab,1989). Pariwisata merupakan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lainnya yang bersifat sementara, baik dilakukan oleh perorangan maupun secara berkelompok sebagai suatu usaha mencari keseimbangan dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu (Spillane, 1987).

Ada tiga aktor penting yang menggerakkan sistem pariwisata, yakni masyarakat, swasta dan pemerintah. Semua komponen tersebut harus berjalan beriringan, perlu koordinasi yang bagus dalam mengembangkan pariwisata di suatu tempat. Ketika salah satu komponen bergerak sendirian, maka hasil yang di dapat tidak optimal dan tidak sesuai target yang diinginkan (Utomo, 2014). Peran masyarakat diperlukan dalam pengembangan pariwisata yaitu: pertama, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Kedua, masyarakat sekitar ikut merasakan manfaat dari adanya wisata. Ketiga pemberian edukasi tentang pariwisata kepada masyarakat lokal (Sunaryo, 2013).

Kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah salah satunya melalui program dana desa. Program ini menjadi salah satu program yang diunggulkan oleh presiden RI periode Jokowi. Dalam visi trisakti yakni membangun Indonesia dari pinggiran, salah satunya tentang kemandirian ekonomi (Nafidah Dan Anisa, 2017). Visi kemandirian ekonomi tersebut dapat dimulai dari wilayah terkecil yang ada di Indonesia yakni di suatu desa. Agenda pembangunan tersebut juga termuat di dalam perpres no. 2 tahun 2015 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 (Nafidah Dan Anisa, 2017). Pembangunan kurang merata menjadi perhatian khusus pada era pemerintahan Jokowi dengan mengalokasikan bantuan untuk setiap desa yang diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur (Kemenku RI, 2017).

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD) adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APB desa berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa (Sujarweni 2015: 33). Demi terciptanya tujuan tersebut, maka penyaluran dana desa harus bisa direalisasikan dengan segera pada tahun berjalan. Proses penyaluran tersebut harus melalui beberapa tahap, dimana terdapat pula syarat-syarat yang harus dipenuhi. Tahap pertama dicairkan pada bulan maret sebesar 40%, tahap kedua pada bulan agustus sebesar 40% dan tahap ketiga 20% pada bulan november (BPKP, 2015).

Secara umum, penggunaan dana desa lebih diprioritaskan untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Lapananda, Yusran, 2016). Pemberdayaan masyarakat, lebih kepada hal-hal yang dapat menambah nilai lebih suatu kegiatan yang sudah ada. Pemberdayaan masyarakat lebih diperuntukkan untuk peningkatan kualitas sosial dasar, pengelolaan sumber daya lokal seperti pariwisata, pengelolaan usaha ekonomi produktif seperti kerajinan yang ada di suatu desa, penguatan kapasitas terhadap bencana yang sering terjadi dan lain sebagainya (Apriliana, 2017).

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam konteks masyarakat

yang tinggal satu daerah dengan kebudayaan dan sejarah yang sama. Dengan pemberdayaan mampu membangun rasa gotong royong untuk kemajuan bersama (Martono, 2017). Masyarakat menjadi salah satu kunci dalam pembangunan yang telah di rancang oleh pemerintah, dengan pemberdayaan menjadikan masyarakat yang mandiri dan keluar dari permasalahan yang akan mereka hadapi baik jangka pendek maupun jangka panjang (Desiati, 2001).

Perkembangan di masa mendatang diperkirakan akan mengikuti pola yang ada sekarang. Persoalannya sekarang adalah bagaimana membangun strategi agar masyarakat dapat menikmati hasil dari perkembangan tersebut. Tentu sangat ironis apabila terjadi suatu produk kebudayaan berkembang pesat, sementara kesejahteraan anggota masyarakat yang mendukungnya tidak pernah meningkat (Soedarso, 2014).

Konsentrasi pengembangan kepariwisataan Jawa Timur dipusatkan pada obyek wisata alam dan budaya. Salah satu kota yang ada di Jawa Timur yaitu Kota Jombang, kota ini terkenal akan julukan Kota Santri dengan banyak berdirinya pondok pesantren di Jombang, akan tetapi Jombang juga memiliki daya tarik tersendiri yaitu potensi pariwisata yang sangat melimpah, baik itu potensi wisata alam, wisata peninggalan bersejarah, maupun wisata religi yang cocok untuk dikunjungi oleh masyarakat umum. Salah satu desa yang memiliki wisata yang ada di Kabupaten Jombang adalah Desa Banjaragung. Desa tersebut memiliki beberapa daya pikat bagi wisatawan untuk dikunjungi dan menjadi obyek wisata, dengan mengusung konsep eduwisata.

Pengembangan desa tidak lepas dari peran pemerintah dan juga masyarakat. Wisata yang dikelola oleh masyarakat setempat dengan konsep wisata yang bisa dikatakan kekinian dengan banyak spot foto tetapi tidak mengesampingkan edukasi dalam bidang pertanian. Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada wisata Bale Tani di Desa Banjaragung Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang dengan judul Program Eduwisata Sebagai Pilihan Rasional Pengusaha Untuk Memajukan Desa Banjaragung.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka perumusan masalahnya adalah Program Eduwisata Manakah Yang Merupakan Pilihan Rasional Bagi Pengusaha Bale Tani Untuk Memajukan Desa Banjaragung ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk program eduwisata sebagai pilihan rasional pengusaha Eduwisata Bale Tani Jombang dalam memajukan wisata desa dengan persepektif teori pilihan rasional dari jamescolmen.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak berikut ini:

1.4.1 Secara Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam memperkaya wawasan terutama tentang program Eduwisata Bale Tani sebagai pilihan rasional Pengusaha Eduwisata Bale Tani Jombang dalam memajukan desa. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan referensi di bidang sosiologi sebagai bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

1.4.2 Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan pengetahuan kepada masyarakat maupun pemerintah untuk penggunaan dana desa, salah satunya melalui eduwisata yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan tercapainya program pemerintah.